

## ANALISIS PENGELOLAAN APBDES DAN DIGITALISASI KEUANGAN DESA TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA DESA BILA RIASE

Suandi<sup>1</sup>, Yusran Bachtiar<sup>2</sup>, Firman Syah<sup>3</sup>

Email : [suandiwear818@gmail.com](mailto:suandiwear818@gmail.com)<sup>1</sup>, [yusranbachtiar01@gmail.com](mailto:yusranbachtiar01@gmail.com)<sup>2</sup>, [ramlan.firmansyah@gmail.com](mailto:ramlan.firmansyah@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

<sup>3</sup>Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan digitalisasi keuangan desa terhadap penerapan good governance di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, dan Pendamping Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Bila Riase telah mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Proses perencanaan dan pelaporan anggaran dilakukan secara terbuka dan disesuaikan dengan regulasi keuangan desa. Sementara itu, penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) online dan sistem transaksi nontunai berbasis QRIS telah meningkatkan efisiensi administrasi, kecepatan pelaporan, serta transparansi keuangan publik. Digitalisasi keuangan juga memperkuat fungsi pengawasan internal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pengelolaan APBDes yang tertib dan digitalisasi keuangan desa yang efektif menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital keuangan desa merupakan instrumen penting dalam memperkuat praktik *good governance* di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** APBDes, Digitalisasi Keuangan Desa, *Good Governance*, SISKEUDES, Transparansi Publik.

### Abstract

*This study aims to analyze the effect of Village Budget (APBDes) management and village financial digitalization on the implementation of good governance in Bila Riase Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. The research employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The key informants include the Village Head, Secretary, Treasurer, Village Consultative Body (BPD) Chair, and Village Facilitator. The findings reveal that the management of APBDes in Bila Riase Village has applied the principles of transparency, accountability, and community participation. Budget planning and reporting are carried out openly and in accordance with village financial regulations. Meanwhile, the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) online and non-cash transactions through QRIS has improved administrative efficiency, reporting speed, and financial transparency. Financial digitalization has also strengthened internal supervision and encouraged citizen participation in monitoring budget utilization. This study concludes that the synergy between well-managed APBDes and effective village financial digitalization is a key factor in realizing transparent, accountable, and participatory village governance. The findings imply that digital transformation of village finance is a crucial instrument for strengthening good governance practices at the local government level.*

**Keywords:** Village Budget (APBDes), Financial Digitalization, Good Governance, SISKEUDES, Public Transparency.

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga [1].

Pengelolaan APBDes yang baik mencerminkan kinerja tata kelola keuangan desa yang efektif dan efisien. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas publik [2]. Dalam hal ini, penerapan *good governance* menjadi konsep penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, partisipatif, responsif, dan berkeadilan [3].

Konsep *good governance* dalam konteks pemerintahan desa menekankan pada tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi mendorong keterbukaan dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan, akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan; dan partisipasi memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan pembangunan desa [4].

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengelolaan keuangan desa kini mulai bertransformasi ke arah digitalisasi. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan BPKP mendorong implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis online untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes [5]. Digitalisasi keuangan desa juga meliputi penggunaan QRIS dan sistem pembayaran nontunai dalam transaksi keuangan desa guna meminimalisasi risiko penyimpangan serta meningkatkan efisiensi administrasi [6].

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 menunjukkan bahwa desa-desa yang telah mengimplementasikan sistem digital keuangan mengalami peningkatan akurasi laporan, ketepatan waktu pelaporan, dan keterbukaan publik terhadap APBDes dibandingkan desa yang masih menggunakan metode manual [7]. Namun, penerapan digitalisasi juga menghadapi hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital aparatur desa, serta resistensi terhadap perubahan sistem kerja [8].

Dalam konteks lokal, Desa Bila Riase merupakan salah satu desa di Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengimplementasikan pengelolaan APBDes berbasis aplikasi SISKEUDES versi 2.0.6 serta uji coba sistem transaksi nontunai dalam beberapa program kegiatan. Kondisi ini menjadikan Desa Bila Riase sebagai contoh menarik untuk dianalisis terkait bagaimana pengelolaan APBDes dan digitalisasi keuangan desa berkontribusi terhadap peningkatan praktik *good governance* di tingkat desa [9].

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian [19] menemukan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akurasi pencatatan transaksi, kecepatan penyusunan laporan, serta penguatan sistem pengendalian internal desa. Penelitian lain [20] menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan melalui pembayaran nontunai di desa-desa di Kabupaten Bone mampu meminimalkan kebocoran anggaran serta memperbaiki kualitas dokumentasi pertanggungjawaban keuangan. Sementara itu, studi [21] mengungkapkan bahwa implementasi SISKEUDES mendorong peningkatan partisipasi masyarakat karena informasi APBDes lebih mudah diakses dan diawasi secara terbuka, sehingga menciptakan tata kelola desa yang lebih baik [18].

Selain itu, penelitian [22] juga menyimpulkan bahwa inovasi layanan berbasis digital di pemerintahan desa berpengaruh positif terhadap praktik *good governance*, terutama pada aspek transparansi, responsivitas, dan efektivitas pengambilan keputusan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes dengan aplikasi digital, termasuk penerapan transaksi nontunai, memiliki hubungan erat dengan keberhasilan desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan keterbukaan. Oleh karena itu, studi mengenai implementasi SISKEUDES dan digitalisasi keuangan desa di Desa Bila Riase menjadi penting untuk melihat sejauh mana inovasi tersebut berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi serta memperkuat

kapasitas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berkelanjutan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif**, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai praktik pengelolaan APBDes dan penerapan digitalisasi keuangan desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Bila Riase. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian [\[11\]](#).

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, serta bagaimana digitalisasi keuangan melalui aplikasi SISKEUDES dan sistem pembayaran nontunai berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa [\[12\]](#).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih secara purposif karena Desa Bila Riase merupakan salah satu desa yang telah menerapkan SISKEUDES Online versi 2.0.6 dan uji coba transaksi nontunai berbasis QRIS dalam pengelolaan keuangan desa [\[9\]](#). Penerapan sistem digitalisasi ini menjadikan Desa Bila Riase sebagai contoh representatif dalam implementasi pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparat pemerintah desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Ketua BPD) serta observasi terhadap praktik pengelolaan APBDes menggunakan aplikasi SISKEUDES.
2. Data sekunder, yaitu dokumen pelengkap seperti Laporan Realisasi APBDes, Laporan SISKEUDES Online, dan dokumen transparansi publik yang dipublikasikan di papan Informasi atau media sosial resmi desa [\[5\]](#).

Kedua sumber data tersebut digunakan untuk memastikan validitas informasi melalui triangulasi data dan sumber.

Penelitian ini terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu:

1. **Pengelolaan APBDes ( $X_1$ )**

Merupakan serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran desa. Indikator yang digunakan meliputi efisiensi anggaran, akuntabilitas laporan, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa [\[13\]](#).

2. **Digitalisasi Keuangan Desa ( $X_2$ )**

Menggambarkan penerapan sistem informasi dan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan desa, seperti penggunaan aplikasi SISKEUDES online, transaksi nontunai (QRIS), serta keterbukaan data keuangan melalui media publik. Indikatornya meliputi efektivitas sistem digital, kecepatan pelaporan, dan tingkat transparansi informasi keuangan [\[6\]](#).

3. **Good Governance (Y)**

Diukur berdasarkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Prinsip ini menjadi ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat lokal [\[3\]](#).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat metode berikut:

1. **Wawancara mendalam**, dilakukan kepada aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan APBDes dan penerapan sistem keuangan digital.
2. **Observasi**, untuk melihat secara langsung implementasi sistem SISKEUDES dan keterbukaan informasi keuangan desa.
3. **Studi dokumentasi**, dengan menelaah dokumen laporan keuangan desa, notulen musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), dan publikasi transparansi keuangan.
4. **Studi pustaka**, dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan hasil penelitian terdahulu terkait pengelolaan keuangan desa dan tata kelola pemerintahan [\[8\]](#).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama, yaitu:

1. **Reduksi data** : memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara dan observasi.

2. **Penyajian data:** menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi, tabel, dan matriks hubungan antara pengelolaan APBDes, digitalisasi keuangan, dan penerapan *good governance*.
3. **Penarikan kesimpulan dan verifikasi:** menginterpretasikan hasil temuan untuk melihat keterkaitan antara variabel dan fenomena yang terjadi di lapangan [\[14\]](#).

Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi resmi yang diperoleh dari pemerintah desa. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui tiga teknik: kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas diperoleh melalui validasi data antar-informan, transferabilitas dicapai dengan mendeskripsikan konteks penelitian secara detail, dan konfirmabilitas dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan bukti dokumen resmi seperti laporan realisasi APBDes dan laporan SISKEUDES Online [\[10\]](#).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Desa Bila Riase terletak di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki luas wilayah  $\pm$  1.500 hektare dengan mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian dan perdagangan kecil. Jumlah penduduk Desa Bila Riase pada tahun 2024 mencapai 2.438 jiwa yang terbagi dalam 4 dusun. Sejak tahun 2022, Desa Bila Riase telah menjadi salah satu desa di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.6 berbasis online, yang terintegrasi langsung dengan BPKP dan Inspektorat Daerah [\[1\]](#).

#### 1. Pengelolaan APBDes

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bila Riase, diketahui bahwa proses pengelolaan APBDes dilakukan secara partisipatif dan terbuka melalui musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

*"Kami selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran. Kegiatan yang dimasukkan ke APBDes berasal dari usulan warga yang disampaikan melalui kepala dusun dan BPD,"*

Sekretaris Desa menambahkan bahwa penyusunan APBDes mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan telah disesuaikan dengan sistem SISKEUDES.

*"Sebelum ada SISKEUDES, kami buat laporan manual, sering terlambat dan kadang salah hitung. Sekarang sudah otomatis dan mudah dikontrol karena semua data masuk sistem,"*

Bendahara Desa menjelaskan bahwa pencatatan dan pelaporan realisasi APBDes dilakukan setiap triwulan. Semua laporan keuangan dikirim secara digital ke Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

*"Setiap akhir triwulan kami kirim laporan keuangan melalui aplikasi SISKEUDES online. Laporan sudah tidak ditulis manual lagi,"*

Ketua BPD juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi meningkat karena laporan keuangan ditempel di papan pengumuman dan dibagikan melalui media sosial desa.

*"Kami bisa pantau langsung kegiatan dan anggaran karena semua laporan dipublikasikan. Kalau ada kegiatan belum sesuai, warga bisa langsung bertanya ke pemerintah desa,"*

Pendamping Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Bila Riase sudah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, meski masih perlu peningkatan literasi digital aparat desa.

*"Dari sisi pengawasan, sistemnya sudah bagus. Hanya saja SDM operator SISKEUDES perlu terus dilatih supaya bisa gunakan semua fiturnya dengan maksimal,"*

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, pelaksanaan APBDes tahun 2023 di Desa Bila Riase menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaporan, dengan tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan ke kabupaten mencapai 98%

#### 2. Digitalisasi Keuangan Desa

Digitalisasi keuangan di Desa Bila Riase berjalan melalui dua instrumen utama:

- a. Penggunaan aplikasi SISKEUDES online dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan;

- b. Penerapan sistem pembayaran nontunai (QRIS dan transfer bank) untuk kegiatan belanja dan bantuan langsung masyarakat.

Menurut Bendahara Desa:

*"Dengan QRIS dan transfer, kami tidak lagi pegang uang tunai dalam jumlah besar. Semua transaksi tercatat otomatis di rekening desa,"*

Sekretaris Desa menambahkan bahwa sistem digital mempercepat proses pelaporan ke kabupaten:

*"Begitu laporan di-input di aplikasi, datanya langsung bisa diakses BPKP dan Dinas PMD. Jadi kami tidak perlu bawa berkas fisik lagi,"*

Namun, Kepala Desa juga mengakui adanya kendala pada koneksi internet yang kadang menghambat proses sinkronisasi data.

*"Kalau jaringan lemah, sistemnya error dan harus diulang. Tapi kami tetap gunakan karena sudah jadi kewajiban laporan digital,"*

Dari hasil dokumentasi, Desa Bila Riase telah memiliki arsip digital keuangan lengkap sejak 2022, termasuk bukti transaksi, SPJ, dan laporan realisasi, yang tersimpan di server SISKEUDES dan Google Drive desa

### 3. Penerapan Prinsip Good Governance

Penerapan *good governance* di Desa Bila Riase terlihat dalam tiga dimensi utama:

#### a. Transparansi

Pemerintah Desa secara rutin mempublikasikan laporan realisasi APBDes dan kegiatan desa pada papan informasi publik, media sosial (Facebook), dan grup WhatsApp warga.

*"Kami sengaja umumkan agar masyarakat tahu uang desa digunakan untuk apa saja. Itu penting supaya tidak ada salah paham,"*

#### b. Akuntabilitas

Setiap transaksi keuangan diverifikasi melalui sistem SISKEUDES yang otomatis mencatat nilai, tanggal, dan akun belanja. Laporan dikirim ke Inspektorat Daerah dan diverifikasi sebelum disahkan.

*"Setiap laporan kami kirim dulu ke Inspektorat untuk dicek. Kalau ada perbedaan, bisa langsung diperbaiki di aplikasi,"*

#### c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi warga meningkat karena akses informasi yang lebih terbuka. Masyarakat aktif dalam musyawarah, memberikan usulan kegiatan, serta ikut memantau proyek fisik desa.

*"Warga sekarang bisa tahu anggaran lewat papan pengumuman dan ikut rapat. Jadi pengawasan masyarakat lebih terasa,"*

Berdasarkan hasil observasi, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi APBDes meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dan keterbukaan informasi mendorong partisipasi aktif warga

## Pembahasan

### 1. Pengelolaan APBDes dan Penerapan Good Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Bila Riase telah mengikuti prinsip *good governance*, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa secara terbuka mempublikasikan laporan keuangan melalui papan informasi dan media sosial, serta melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa sejak tahap perencanaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian [2] yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara partisipatif dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. Penelitian [10] juga menegaskan bahwa praktik pengelolaan keuangan yang transparan akan mendorong meningkatnya efektivitas pengawasan publik di desa.

Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian [15] yang menemukan bahwa masih banyak desa di Indonesia yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas akibat rendahnya kapasitas administrasi dan lemahnya pengawasan internal. Dalam kasus Bila Riase, kondisi tersebut telah teratasi karena adanya dukungan sistem digital dan pembinaan intensif dari pendamping desa serta Inspektorat.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah konteks penerapannya. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menilai proses manual

pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian ini fokus pada pengelolaan APBDes berbasis sistem digital (SISKEUDES) yang lebih efisien dan memiliki *audit trail* otomatis. Dengan demikian, pengelolaan APBDes di Desa Bila Riase tidak hanya memenuhi prinsip *good governance* secara administratif, tetapi juga secara teknologis dan sistematis.

## 2. Digitalisasi Keuangan Desa dan Penerapan *Good Governance*

Digitalisasi keuangan desa di Desa Bila Riase melalui SISKEUDES Online dan penggunaan QRIS terbukti meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan. Proses pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat, serta masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih terbuka.

Temuan ini mendukung hasil penelitian [10] yang menjelaskan bahwa implementasi *digital governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan keterbukaan data dan kecepatan pelaporan. Penelitian [5] juga menyimpulkan bahwa penerapan SISKEUDES Online dapat menurunkan tingkat kesalahan pelaporan dan mempercepat proses audit hingga 35% dibandingkan metode manual.

Namun, temuan penelitian ini juga menemukan kendala serupa dengan penelitian [8], yaitu keterbatasan jaringan internet dan literasi digital aparatur desa yang masih menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem keuangan digital di daerah pedesaan. Kendati demikian, berbeda dengan penelitian [8], penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui pendampingan teknis rutin dan kolaborasi antara pemerintah desa dengan Inspektorat dan Dinas PMD.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pengungkapan bahwa digitalisasi keuangan bukan hanya alat bantu administratif, tetapi juga instrumen pengawasan dan transparansi publik. Dalam konteks Bila Riase, digitalisasi telah memperluas partisipasi masyarakat dan memperkuat akuntabilitas keuangan, sehingga *good governance* dapat tercapai tidak hanya melalui aturan, tetapi melalui teknologi yang transparan dan terintegrasi.

## 3. Sinergi Pengelolaan APBDes dan Digitalisasi Keuangan dalam Mewujudkan *Good Governance*

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan sinergis antara pengelolaan APBDes yang tertib dan penerapan sistem digital keuangan desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Keduanya saling melengkapi: pengelolaan APBDes yang baik menyediakan struktur manajerial yang akuntabel, sementara sistem digital memberikan sarana untuk memastikan keterbukaan dan kecepatan informasi.

Temuan ini selaras dengan penelitian [4] yang menyebutkan bahwa keberhasilan *good governance* di tingkat lokal bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan tata kelola tradisional dengan inovasi sistem informasi publik. Hasil penelitian ini juga mendukung teori transparansi publik [3] bahwa digitalisasi merupakan elemen penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Namun, berbeda dengan penelitian [16], [17] yang menemukan bahwa digitalisasi keuangan belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan kontrol dan pengawasan internal, penelitian ini membuktikan bahwa sistem digital justru memperkuat mekanisme pengawasan karena setiap transaksi tercatat secara otomatis dan dapat diaudit kapan saja oleh pihak berwenang.

Dengan demikian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada konteks empirisnya:

- a. Penelitian ini menunjukkan keberhasilan penerapan digitalisasi di desa dengan kapasitas SDM terbatas,
- b. Tetapi mampu menghasilkan transparansi dan akuntabilitas tinggi berkat integrasi sistem digital dan pendampingan aparatur.

Hal ini memperkuat argumen bahwa *good governance* di era sekarang tidak hanya ditentukan oleh integritas aparatur, tetapi juga oleh transformasi digital dan keterbukaan data keuangan publik.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan APBDes di Desa Bila Riase telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan melalui musyawarah desa (Musdes) dan publikasi laporan keuangan di papan informasi serta media sosial. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan keuangan berbasis SISKEUDES yang diaudit secara berkala oleh Inspektorat Daerah. Partisipasi masyarakat juga meningkat karena mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi program desa. Hal ini membuktikan bahwa tata kelola keuangan desa yang baik menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
2. Digitalisasi keuangan desa berkontribusi signifikan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penerapan aplikasi SISKEUDES online dan sistem pembayaran QRIS di Desa Bila Riase telah meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelaporan, dan meminimalisasi risiko penyimpangan. Sistem digital juga memungkinkan pengawasan real-time oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat, sehingga memperkuat praktik *good governance* di tingkat desa.
3. Sinergi antara pengelolaan APBDes dan digitalisasi keuangan desa terbukti efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kombinasi kedua aspek tersebut menciptakan sistem keuangan desa yang transparan, efisien, dan dapat diaudit kapan saja. Meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan jaringan internet dan literasi digital aparatur desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan, praktik *good governance* dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa *good governance* di era modern tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan moralitas aparatur, tetapi juga oleh inovasi teknologi dan keterbukaan data publik.

### Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian pada desa lain di luar Kabupaten Sidenreng Rappang agar diperoleh perbandingan antarwilayah terkait efektivitas digitalisasi keuangan desa.
2. Diperlukan regulasi yang mendorong desa untuk menggunakan transaksi keuangan nontunai secara menyeluruh, demi mempercepat transformasi digital dan mencegah penyalahgunaan dana publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [2] Sutrisno, E. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- [3] Komite Nasional Kebijakan Governance. (2020). *Pedoman Umum Good Governance di Lingkungan Pemerintahan*. Jakarta: KNKG. Diakses dari <https://www.knkg-indonesia.org>
- [4] Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Good Governance di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [5] BPKP. (2022). *Panduan Implementasi SISKEUDES Online 2.0.6*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diakses dari <https://www.bpkp.go.id/siskeudes>
- [6] Kementerian Desa PDTT. (2023). *Laporan Digitalisasi Keuangan Desa di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. Diakses dari <https://kemendesa.go.id/>
- [7] Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Evaluasi Nasional Penerapan Sistem Keuangan Desa Online*. Jakarta: Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

- [8] Setiawan, R., & Astuti, L. (2022). "Tantangan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Desa di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Tata Kelola dan Keuangan Daerah*, 4(2), 115–128.
- [9] Pemerintah Desa Bila Riase. (2024). Laporan Realisasi APBDes dan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Online Tahun 2023. Bila Riase: Pemerintah Desa.
- [10] Sari, N., & Rahman, F. (2023). "Digital Governance dan Akuntabilitas Keuangan Publik di Pemerintahan Desa." *Jurnal Akuntansi Publik dan Inovasi Pemerintahan*, 8(1), 22–34.
- [11] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [12] Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [13] Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/>
- [14] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.
- [15] Nurhayati, S. (2020). "Kendala Implementasi Akuntabilitas Keuangan Desa di Era Otonomi." *Jurnal Tata Kelola Publik*, 5(2), 91–104.
- [16] Harsono, T. (2020). "Evaluasi Penerapan Digitalisasi Keuangan di Pemerintah Desa: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Pemerintahan Digital Indonesia*, 3(1), 44–58.
- [17] Damis, S., & Harun, H. (2024). Peningkatan Pendapatan Usaha Umkm Asoka Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang Melalui Digitalisasi Bisnis. *Economics and Digital Business Review*, 5(1).
- [18] Damis, S., Andi, A. R., & Sofian, S. (2025). Family Financial Revolution Through Digital Finance in The Lower Middle-Class Community. *Economics and Business Journal (ECBIS)*, 3(4), 387-396.
- [19] Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 152-165.
- [20] Nada, S. W. (2024). Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Negeri (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- [21] Prasetyo, P. (2020). Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- [22] Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi desa sebagai upaya percepatan pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26-34.